

Preferensi Pengguna Kendaraan Pribadi dalam Memilih Jenis BBM Subsidi dan Non Subsidi

Andrian Setiawan¹⁾

Sasana Putra²⁾

Aleksander Purba³⁾

Abstract

Gasoline is an important item and becomes a basic need for the community. Subsidized gasoline in Bandar Lampung experienced sales restrictions according to the specified quota. The price of subsidized gasoline which is cheaper than non-subsidized gasoline makes people willing to wait to get subsidized gasoline. This study aims to determine the factors that influence the selection of gasoline types and determine the preferences of each private vehicle user in choosing gasoline, both subsidized gasoline and non-subsidized types. This research uses AHP (Analytical Hierarchy Process) method

Based on the results of the analysis conducted on the group of civil servants, non-civil servants and students, it was found that the group of non-civil servants chose Premium which was the most priority with a weighting value of 0.3745, then for Paltalite of 0.3156 and Pertamina 0.3108. Then for the group of civil servants, the greatest or priority results were Premium with a value of 0.3457, then Pertamina with a value of 0.3350 and Paltalite with a value of 0.3205. Then, for the Student group the most priority results are Premium of 0.3479, then Paltalite of 0.3288 and Pertamina with a difference not too far at 0.3263.

Keywords: Preferences, Analytical Hierarchy Process, Private Vehicles and Gasoline

Abstrak

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat serta merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. BBM bertipe subsidi di kota Bandar Lampung mengalami pembatasan penjualan sesuai berdasarkan kuota yang ditentukan. Harga BBM tipe subsidi yang lebih murah dari BBM non subsidi membuat masyarakat rela menunggu untuk mendapatkan BBM subsidi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam pemilihan tipe BBM dan mengetahui preferensi masing-masing pengguna kendaraan pribadi dalam memilih BBM, baik tipe subsidi maupun tipe non subsidi. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Hierarki Proses.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada kelompok Non PNS, PNS dan Pelajar/Mahasiswa, diperoleh hasil bahwa kelompok Non PNS memilih Premium yang merupakan paling prioritas dengan nilai bobot 0,3745, lalu untuk Paltalite sebesar 0,3156 dan Pertamina 0,3108. Lalu untuk kelompok PNS didapatkan hasil yang paling besar atau prioritas adalah Premium dengan nilai sebesar 0,3457, kemudian Pertamina dengan nilai sebesar 0,3350 dan Paltalite dengan nilai sebesar 0,3205. Lalu, untuk kelompok Pelajar/Mahasiswa diperoleh hasil yang paling prioritas adalah Premium sebesar 0,3479, lalu Paltalite sebesar 0,3288 dan Pertamina dengan selisih yang tidak terlalu jauh sebesar 0,3263.

Kata kunci: Preferensi, Analisis Hierarki Proses, Kendaraan Pribadi dan BBM

¹⁾ Mahasiswa pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung.

²⁾ Dosen pengajar pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jalan. Prof. Sumantri Brojonegoro 1. Gedung Meneng Bandar Lampung. 35145.

³⁾ Dosen pengajar pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jalan. Prof. Sumantri Brojonegoro 1. Gedung Meneng Bandar Lampung. 35145.

1. PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu bagian terpenting untuk kehidupan masyarakat dan kebutuhan pokok bagi masyarakat. BBM diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu BBM subsidi dan BBM non subsidi. BBM subsidi di kota Bandar Lampung mengalami pembatasan penjualan sesuai kuota yang ditentukan, harga yang lebih murah dari BBM non subsidi membuat masyarakat rela antri untuk mendapatkan BBM subsidi. Kelangkaan BBM subsidi terjadi karena konsumsi dari masyarakat yang terus menerus meningkat sehingga terjadi banyak antrian di sejumlah SPBU yang mempunyai stok BBM subsidi seperti premium.

Penelitian ini menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan BBM serta gambaran preferensi masing-masing pengguna kendaraan pribadi dalam memilih BBM baik subsidi maupun non subsidi. Jenis kendaraan yang ditinjau dalam penelitian ini adalah kendaraan pribadi roda empat yang berbahan bakar subsidi (Premium) dan non subsidi (Pertalite dan Pertamax).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Preferensi

Preferensi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Preference* yang berarti kesukaan dalam sebuah hal dibandingkan dengan hal lain. Preferensi menurut Kotler (1997) merupakan pilihan dari seseorang yang menunjukkan suka atau tidak suka terhadap produk (barang atau jasa) yang akan dikonsumsi.

2.2. Tahap-Tahap Preferensi

Menurut Nicholson (2002) hubungan preferensi konsumen memiliki tiga sifat dasar, antara lain : Kelengkapan (*Completeness*), Transivitas (*Transivity*) dan Kontinuitas (*Continuity*).

2.3. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (PP No. 44 Tahun 1993).

2.4. Pengertian Bahan Bakar Minyak

BBM biasa digunakan untuk kendaraan, tanpa adanya BBM kendaraan yang digunakan tidak akan berfungsi sebagai mana mestinya. Bahan bakar merupakan suatu materi yang dapat diubah menjadi suatu energi, biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang bisa dilepaskan dan dimanipulasi. Bahan bakar biasanya dipergunakan manusia melalui proses pembakaran atau reaksi redoks, dimana bahan bakar akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen. BBM dibagi menjadi dua jenis yaitu BBM subsidi seperti Premium dan BBM non subsidi seperti Pertalite dan Pertamax.

2.5. Analisis Multi Kriteria

Analisis Multi Kriteria merupakan salah satu metode pemilihan alternatif, dimana pada tiap alternatif dinilai menggunakan kriteria-kriteria, sehingga alternatif yang terpilih adalah alternatif dengan penilaian terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

2.6. Metode-Metode Analisis Multi Kriteria

Secara umum Analisis Multi Kriteria memiliki beberapa metode, antara lain: Metode Perbandingan Eksponensial (MPE), *Composite Performance Index* (CPI), Metode Bayes dan Analytical Hierarchy Process. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah AHP.

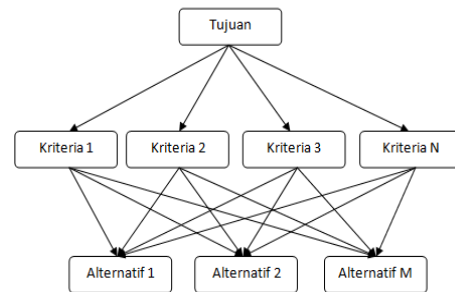
2.7. Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP merupakan salah satu cara pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970. Model pendukung keputusan menjelaskan masalah banyak faktor atau banyak kriteria yang lengkap menjadi suatu hierarki. Hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari permasalahan yang lengkap dalam struktur tiap level dimana level pertama adalah tujuan, yaitu level faktor, kriteria, sub kriteria dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif (Saaty, 1993). Dengan hirarki, masalah dapat diuraikan atau dijelaskan ke dalam kelompok-kelompoknya lalu kemudian dapat diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan lebih terstruktur dan juga sistematis.

Tingkat Pertama : Tujuan keputusan

Tingkat Kedua : Kriteria-kriteria

Tingkat Ketiga : Alternatif-alternatif



AHP berguna untuk menurunkan skala rasio dari beberapa perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu. Perbandingan berpasangan tersebut didapatkan lewat pengukuran melalui aktual maupun pengukuran melalui relatif dari derajat kesukaan seseorang, kepentingan seseorang atau perasaan seseorang. Dengan demikian metode ini dapat membantu mendapatkan suatu skala rasio dari hal-hal yang sulit diukur yaitu pendapat, perasaan, perilaku dan juga keyakinan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process*. Penelitian dilakukan pada tanggal 28 – 31 Oktober 2019 di wilayah SPBU Jalan Urip Sumoharjo, SPBU Jalan Soekarno Hatta, Universitas Lampung dan Kantor Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Data diperoleh dari teknik pengumpulan data primer atau pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara menggunakan kuesioner dengan 250 responden yang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok Non PNS, PNS dan Pelajar/Mahasiswa. Data yang diperlukan adalah karakteristik responden yang meliputi : nama, jenis kelamin, usia jenis pekerjaan, alamat, jumlah pendapatan rata-rata perbulan, alokasi dana/minggu serta jenis kendaraan yang dimiliki. Lalu variabel penelitian yang meliputi : kesesuaian harga, alokasi dana, keiritan BBM, ketersediaan BBM, aksesibilitas, antrean, keawetan mesin dan performa mesin

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Pengguna Kendaraan Pribadi

Dari survey yang telah dilaksanakan pada 250 responden yang dikelompokkan menjadi Non PNS sebanyak 115 responden, PNS sebanyak 77 responden dan Pelajar/Mahasiswa sebanyak 58 responden diperoleh karakteristik responden pengguna kendaraan dalam memilih jenis BBM sebagai berikut :

4.1.1. Jenis Kelamin Responden

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	215	86
Perempuan	35	14
Jumlah	250	100

4.1.2. Usia Responden

Tabel 2. Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase (%)
<20	38	15,2
21 - 30	57	22,8
31 - 40	65	26
41 - 50	61	24,4
>50	29	11,6
Jumlah	250	100

4.1.3. Jenis Pekerjaan Responden

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden

Usia	Jumlah	Persentase (%)
Pelajar/Mahasiswa	58	23,2
Pegawai Negeri	77	30,8
Pegawai Swasta	22	8,8
Wiraswasta/Wirusaha	78	31,2
Ibu Rumah Tangga	3	1,2
Dan lain-lain	12	4,8
Jumlah	250	100

4.1.4. Jumlah Pendapatan/Uang Saku Rata-Rata Responden Perbulan

Tabel 4. Jumlah Pendapatan Rata-Rata Perbulan

Jumlah Pendapatan/Bulan	Jumlah	Persentase (%)
Rp2.001.000,00 - Rp3.000.000,00	26	13,5
Rp3.001.000,00 - Rp4.000.000,00	66	34,
Rp4.001.000,00 - Rp5.000.000,00	42	21,9
Rp5.001.000,00 - Rp6.000.000,00	41	21,4
≥Rp6.000.000,00	17	8,9
Jumlah	192	100

Tabel 5. Jumlah Uang Saku Rata-Rata Perbulan

Jumlah Saku/Bulan	Jumlah	Persentase (%)
Rp1.001.000,00-Rp2.000.000,00	38	23,2
Rp2.001.000,00 - Rp3.000.000,00	17	30,8
Rp3.001.000,00 - Rp4.000.000,00	3	8,8
Jumlah	58	100

4.1.5. Alokasi Dana untuk BBM Perminggu

Tabel 6. Alokasi Dana Perminggu

Alokasi Dana/Minggu	Jumlah	Persentase (%)
Rp100.000,00 - Rp200.000,00	110	44
Rp201.000,00 - Rp300.000,00	107	42,8
Rp301.000,00 - Rp400.000,00	18	7,2
≥Rp400.000,00	15	6
Jumlah	250	100

4.2. Analisis Data

Setelah data hasil survei persepsi responden dalam memilih jenis BBM yang dibutuhkan mencukupi dari data yang ditentukan, tahapan selanjutnya adalah analisis data. Data kriteria dan sub kriteria telah diskoring berdasarkan skala fundamental dengan cara menilai sesuai tingkat kepentingan atau paling prioritas. Penelitian ini menggunakan skoring 1, 2 dan 3, untuk tingkat kepentingan 1 diberi nilai 9, tingkat kepentingan 2 diberi nilai 5 dan tingkat kepentingan 3 diberi nilai 3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Nilai Skoring

Rangking	Keterangan
1	9 (Mutlak Lebih Penting)
2	5 (Cukup Lebih Penting)
3	3 (Agak Penting)

Berikut merupakan nilai skoring yang telah dijumlahkan :

Tabel 8. Jumlah Nilai Skoring

Kriteria	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Ekonomi	887	601	442
Pasar	571	435	284
Resiko	497	273	260
Ekonomi	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Kesesuaian Harga	805	581	422
Alokasi Dana	625	425	286
Keiritan BBM	525	303	278
Pasar	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Ketersediaan BBM	793	547	420
Aksesibilitas	667	477	294
Antrian	495	285	278
Resiko	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Keawetan Mesin	881	557	418
Performa Mesin	727	521	382
Kesesuaian Harga	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	917	589	416
Pertalite	551	397	288
Pertamax	489	323	282
Alokasi Dana	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	891	585	434
Pertalite	593	427	336
Pertamax	465	297	216
Keiritan BBM	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	855	491	420
Pertalite	541	389	292
Pertamax	559	429	266
Ketersediaan BBM	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	551	301	236
Pertalite	861	517	478
Pertamax	543	491	274
Aksesibilitas	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	571	381	236
Pertalite	845	479	462

Pertamax	541	449	292
Antrian	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	739	523	368
Pertalite	631	407	320
Pertamax	585	383	294
Keawetan Mesin	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	603	333	312
Pertalite	533	351	230
Pertamax	819	625	440
Performa Mesin	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	597	311	252
Pertalite	491	347	232
Pertamax	867	651	502

4.2.1. Matriks Perbandingan Berpasangan

Matriks perbandingan berpasangan merupakan langkah awal dalam perhitungan metode AHP. Pada langkah ini dilakukan pembobotan dari nilai skoring keseluruhan pada tiap kriteria, sub kriteria dan alternatif. Berikut merupakan rumus beserta contoh untuk mencari matriks perbandingan berpasangan.

$$Ekonomi - Pasar = \frac{a}{b} = \frac{442}{284} = 1,5663$$

$$Ekonomi - Resiko = \frac{a}{c} = \frac{442}{260} = 1,7$$

Berikut adalah hasil perhitungan dari kriteria pada kelompok Pelajar/Mahasiswa :

Tabel 9. Matriks Perbandingan Berpasangan

Kriteria	Ekonomi (a)	Pasar (b)	Resiko (c)
Ekonomi (a)	1	1,5563	1,7
Pasar (b)	0,6425	1	1,0923
Resiko (c)	0,5882	0,9115	1
Total	2,2307	3,4678	3,7923

4.2.2. Skala Prioritas

Pada tahap ini dilakukan penentuan skala prioritas kriteria antara satu kriteria dengan kriteria yang lain. Seperti contoh perhitungan faktor prioritas dari kriteria Ekonomi kelompok Pelajar/Mahasiswa dengan rumus sebagai berikut :

$$\left(\left(\frac{Ekonomi}{Ekonomi} / \Sigma Total \right) + \left(\frac{Ekonomi}{Pasar} / \Sigma Total \right) + \left(\frac{Ekonomi}{Resiko} / \Sigma Total \right) \right) \times 1/n$$

$$\left((1/2,2308) + (1,5563/3,4718) + (1,7/3,7923) \right) \times 1/3 = 0,4483$$

Untuk hasil perhitungan skala prioritas dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Skala Prioritas

Kriteria	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Ekonomi	0,4537	0,4591	0,4483
Pasar	0,2921	0,3323	0,2880
Resiko	0,2542	0,2086	0,2637
Ekonomi	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Kesesuaian Harga	0,4118	0,4439	0,4280
Alokasi Dana	0,3197	0,3247	0,2901
Keiritan BBM	0,2685	0,2315	0,2819
Pasar	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Ketersediaan BBM	0,4056	0,4179	0,4434
Aksesibilitas	0,3412	0,3644	0,2964
Antrian	0,2532	0,2177	0,2802
Resiko	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Keawetan Mesin	0,5479	0,5713	0,5225
Performa Mesin	0,4521	0,4287	0,4775
Kesesuaian Harga	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	0,4686	0,4500	0,4219
Pertalite	0,2816	0,3033	0,2921
Pertamax	0,2499	0,2468	0,2860
Alokasi Dana	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	0,4572	0,4469	0,4402
Pertalite	0,3043	0,3262	0,3408
Pertamax	0,2386	0,2269	0,2191
Keiritan BBM	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	0,2373	0,3751	0,4294
Pertalite	0,2767	0,2972	0,2986
Pertamax	0,2859	0,3277	0,2720
Ketersediaan BBM	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	0,2818	0,2299	0,2389
Pertalite	0,4404	0,3950	0,4838
Pertamax	0,2777	0,3751	0,2773
Aksesibilitas	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	0,2804	0,2911	0,2384
Pertalite	0,4149	0,3659	0,4667

Pertamax	0,3047	0,3430	0,2949
Antrian	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	0,3780	0,3983	0,3747
Pertalite	0,3228	0,3100	0,3259
Pertamax	0,2992	0,2917	0,2994
Keawetan Mesin	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	0,3084	0,2544	0,3177
Pertalite	0,2726	0,2681	0,2342
Pertamax	0,4189	0,4775	0,4481
Performa Mesin	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	0,3054	0,2376	0,2539
Pertalite	0,2512	0,2651	0,2405
Pertamax	0,4435	0,4973	0,5058

4.2.3. Menghitung CI dan CR

Setelah mendapatkan bobot prioritas untuk setiap kriteria, sub kriteria dan alternatif (yang ada pada kolom *priority factor*), maka selanjutnya mengecek bobot yang telah dibuat konsisten atau tidak. Untuk hal ini, yang pertama dilakukan adalah menghitung λ Max, berikut adalah contoh perhitungan dari kriteria pada kelompok Pelajar/Mahasiswa. Cara perhitungannya adalah dengan menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah dan *priority factor* seperti perhitungan berikut :

$$\lambda \text{ Max} = (2,2308 \times 0,4537) + (3,4718 \times 0,2921) + (3,7923 \times 0,2542) = 3$$

Setelah didapatkan λ Max, maka langkah berikutnya menghitung *Consistency Index* (CI) dengan rumus berikut :

$$CI = (\lambda \text{Max} - n) / (n - 1), \text{ untuk } n = 3$$

$$CI = (3 - 3) / (3 - 1) = 0$$

Dikarenakan nilai $CI = 0$ maka pembobotan yang dilakukan sangat konsisten, selanjutnya menghitung *Consistency Ratio* (CR) dengan rumus sebagai berikut :

$$CR = CI / RI$$

$$CR = 0 / 0,58 = 0,0$$

Jika hasil perhitungan CR lebih kecil atau sama dengan 10% , ketidakkonsistenan masih bisa diterima, sebaliknya jika lebih besar dari 10%, tidak dapat diterima.

4.2.4. Skala Prioritas Gabungan Alternatif dengan Sub Kriteria

Perhitungan nilai bobot gabungan dilakukan dengan cara menggabungkan hasil nilai prioritas sub kriteria dengan nilai prioritas alternatif. Seperti contoh perhitungan bobot gabungan sub kriteria dari Ekonomi dengan alternatif Premium dari kelompok Non PNS dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (\text{Kesesuaian Harga} \times \text{Premium}) + (\text{Alokasi Dana} \times \text{Premium}) + (\text{Keiritan BBM} \times \text{Premium}) \\ &= (0,4118 \times 0,4686) + (0,3197 \times 0,4572) + (0,2685 \times 0,4373) \\ &= 0,4565 \end{aligned}$$

Untuk hasil keseluruhan bobot nilai prioritas gabungan alternatif dengan sub kriteria untuk kelompok Non PNS, PNS dan Pelajar/Mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Bobot Gabungan Alternatif dengan Subkriteria

Sub Kriteria Ekonomi	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	0,4565	0,4316	0,4293
Pertalite	0,2896	0,3120	0,3148
Pertamax	0,2559	0,2590	0,2626
Sub Kriteria Pasar	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	0,3096	0,2889	0,2768
Pertalite	0,4077	0,3659	0,4345
Pertamax	0,2827	0,3452	0,2887
Sub Kriteria Resiko	Non PNS	PNS	Pelajar/Mahasiswa
Premium	0,3071	0,2472	0,2872
Pertalite	0,2629	0,2668	0,2372
Pertamax	0,4300	0,4860	0,4756

4.2.5. Skala Prioritas Gabungan Akhir

Perhitungan nilai bobot gabungan dilakukan dengan cara menggabungkan hasil penilaian kriteria dengan hasil penilaian nilai prioritas alternatif gabungan. Seperti contoh perhitungan bobot nilai gabungan tiap Kriteria dengan Alternatif Premium dari kelompok Non PNS dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= (\text{Ekonomi} \times \text{Premium}) + (\text{Pasar} \times \text{Premium}) + (\text{Resiko} \times \text{Premium}) \\ &= (0,4537 \times 0,4565) + (0,2921 \times 0,3057) + (0,2542 \times 0,3071) \\ &= 0,3745 \end{aligned}$$

Untuk hasil keseluruhan bobot nilai prioritas gabungan untuk kelompok Non PNS, PNS dan Pelajar/Mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 12, Tabel 13 dan Tabel 14.

Tabel 12. Bobot Gabungan Akhir Non PNS

	Bobot	Premium	Pertalite	Pertamax
Ekonomi	0,4537	0,4565	0,2896	0,2559
Pasar	0,2921	0,3096	0,4077	0,2827
Resiko	0,2542	0,3071	0,2629	0,4300
Bobot Gabungan		0,3756	0,3173	0,3080

Tabel 13. Bobot Gabungan Akhir PNS

	Bobot	Premium	Pertalite	Pertamax
Ekonomi	0,4591	0,4316	0,3120	0,2590
Pasar	0,3323	0,2886	0,3659	0,3452
Resiko	0,2086	0,2472	0,2668	0,4860
Bobot Gabungan		0,3457	0,3205	0,3350

Tabel 14. Bobot Gabungan Akhir Pelajar/Mahasiswa

	Bobot	Premiu m	Pertalit e	Pertama x
Ekonomi	0,4483	0,4293	0,3148	0,2626
Pasar	0,2880	0,2768	0,4345	0,2887
Resiko	0,2637	0,2872	0,2372	0,4756
Bobot Gabungan		0,3479	0,3288	0,3263

Berdasarkan pada Tabel 12, Tabel 13 dan 14 dapat dilihat untuk pemilihan bahan bakar pada kelompok Non PNS, PNS dan Pelajar/Mahasiswa lebih memprioritaskan Premium sebagai bahan bakar dibandingkan Pertalite dan Pertamax. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna kendaraan pribadi cenderung melihat harga untuk memilih bahan bakar dibandingkan kualitas bahan bakar tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Preferensi Pengguna Kendaraan Pribadi dalam Memilih Jenis BBM Subsidi dan Non Subsidi di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process*, dapat disimpulkan bahwa preferensi pengguna kendaraan pribadi dalam memilih bahan bakar lebih cenderung pada BBM jenis Premium sebagai pilihan yang prioritas dikarenakan harga yang lebih murah, lalu Pertamina merupakan pilihan yang kedua karena kualitas bahan bakar lebih baik diantara Premium atau Pertalite. Sedangkan harga yang sedikit mahal dari Premium, lalu opini yang berkembang di masyarakat

mengenai Pertalite adalah bahan bakar yang kurang baik digunakan untuk kendaraan, menjadikan Pertalite sebagai pilihan terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Kotler, Philip. 1997. *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*. Jakarta : PT. Prehallindo.
- Nicholson, Walter. 2002. *Mikroekonomi Intermediate*. (Edisi ke-8). Jakarta : Erlangga.
- Republik Indonesia. 1993. *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Saaty, Thomas Lorie. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik Untuk Mengambill Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.